



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM DIVERSIFIKASI SUMBER PNBP

Deniza Mulia Nita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
deniza.nita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu komponen signifikan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dengan beralihnya porsi dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), pemerintah perlu mencari alternatif sumber penerimaan guna menjaga stabilitas fiskal. Danantara Indonesia sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF), bertujuan mengelola aset BUMN dan investasi negara lainnya secara optimal untuk investasi jangka panjang.

Sebagian dividen BUMN dialihkan sebagai kontribusi penyertaan modal negara (PMN) ke Danantara agar dapat dikelola secara lebih produktif. Dampaknya, porsi dividen yang selama ini masuk sebagai PNBP akan berkurang, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa tanpa dividen BUMN, potensi kehilangan penerimaan PNBP bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 8 Mei 2025, untuk memenuhi target PNBP, Kemenkeu telah menjalankan empat strategi utama. *Pertama*, melakukan perbaikan tata kelola melalui evaluasi dan penyesuaian tarif PNBP pada berbagai komoditas sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perikanan, panas bumi, serta mineral dan batu bara (minerba). Upaya perbaikan ini juga mencakup peningkatan kualitas layanan publik, penyempurnaan regulasi, optimalisasi pemanfaatan aset negara, serta dorongan inovasi dan peningkatan mutu layanan di satuan kerja (satker) dan badan layanan umum (BLU).

Kedua adalah memperkuat kepatuhan serta memperluas basis penerimaan negara. Suahasil Nazara menyebutkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan proses bisnis, melaksanakan program bersama (*joint program*), serta memperkuat mekanisme penagihan piutang PNBP, termasuk dengan sistem pemblokiran otomatis (ABS) dan pemblokiran atas rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Suahasil juga menambahkan bahwa integrasi sistem akan diperluas, termasuk penambahan komoditas dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), serta replikasi sistem serupa secara bertahap ke sektor kehutanan dan perikanan.

Strategi *ketiga* mencakup pemberian insentif PNBP secara selektif. Bentuk insentif ini antara lain melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), tarif PNBP 0 persen untuk mendukung hilirisasi batu bara, dan penyesuaian tarif lebih rendah bagi produk hasil pengolahan dan pemurnian dalam proses hilirisasi mineral.

Strategi *keempat*, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, diwujudkan melalui pengembangan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) versi terbaru guna meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas. Selain itu, Kemenkeu juga memperkuat organisasi dalam rangka penggalan potensi dan pengawasan PNBP serta menerapkan skema perbantuan atau *secondment*.

Walaupun kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang melalui pengelolaan aset strategis, tantangan fiskal dalam jangka pendek menjadi fokus utama pemerintah. Kemenkeu harus mampu mengelola transisi ini dengan bijak, memastikan sumber-sumber penerimaan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun stabilitas fiskal. Kolaborasi lintas lembaga, inovasi dalam pengelolaan aset negara, serta pengawasan dari DPR RI menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini agar tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Pada akhirnya, pemindahan dividen BUMN ke Danantara mencerminkan upaya pemerintah dalam mentransformasi model pengelolaan kekayaan negara menuju arah yang lebih modern dan berdaya saing. Namun, tanpa strategi alternatif yang kuat untuk menjaga performa PNBPN, kebijakan ini berisiko menimbulkan tekanan terhadap APBN. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan respons pemerintah dalam mencari sumber penerimaan baru akan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan ini di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Atensi DPR

Diversifikasi sumber PNBPN menjadi sebuah keharusan strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan APBN terutama setelah adanya kebijakan pengalihan sebagian dividen BUMN ke Danantara. Pemerintah diharapkan untuk dapat menggali potensi PNBPN lainnya seperti optimalisasi aset negara, penerimaan sektor sumber daya alam, layanan pemerintah, serta inovasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya transparansi Kemenkeu dalam menjelaskan arah kebijakan fiskal baru, khususnya terkait optimalisasi potensi PNBPN dan dampak pengalihan dividen BUMN terhadap keseimbangan fiskal jangka pendek maupun panjang. Pengelolaan Danantara juga harus profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik. Mitigasi risiko perlu disiapkan dalam pengelolaan aset negara oleh Danantara, mengingat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Imbal hasil yang optimal dari pengelolaan aset menjadi kunci agar kontribusi tidak langsung Danantara terhadap keuangan negara tetap nyata dan berkelanjutan.

Sumber

antaranews.com, 8 Mei 2025;
ddtc.co.id, 13 Mei 2025;
pajak.com, 12 Mei 2025; dan
tempo.com, 9 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*